

## **BAB IV PENUTUP**

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada BAB sebelumnya, maka disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi berkaitan dengan putusannya yang bersifat final dan mengikat, tidak ada lagi lembaga penguji yang lain sehingga dianggap putusan itu bersifat mutlak (absolut) kemungkinan bisa terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan, dikhawatirkan Keputusan yang diputuskan hakim Terduga tidak independen dan tidak memberikan rasa keadilan hukum masyarakat. MK yang dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi ternyata terjadi pelanggaran etika dan hukum yang justru melibatkan Ketua MK dan beberapa hakim konstitusi. Independensi dan kenegarawanan hakim MK yang menjadi syarat hakim konstitusi ternyata tidak terbukti. Kehadiran Pengawasan eksternal MK berfungsi ikut menjaga marwah dan keluhuran hakim konstitusi, selain itu sebagai *checks and balances* agar lembaga MK tidak menjadi lembaga super bodi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun.
2. Mekanisme Pengawasan Eksternal hakim konstitusi sebagai berikut: 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim konstitusi; 2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik; 3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim secara tertutup ; 4. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim; 5. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim konstitusi. Prosedur pemberian sanksi apabila terbukti bersalah diberikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari pelanggaran ringan berupa teguran lisan dan tertulis sampai tiga (3) kali. Pemberian sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat sampai dengan tidak hormat.

#### **Saran**

1. Menyarankan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) untuk mengadakan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B Tentang Komisi Yudisial dengan menambahkan satu Pasal tentang kewenangan Komisi Yudisial mengawasi Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah Konstitusi.

2. Dengan diadakannya perubahan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 Tentang Komisi Yudisial maka akan diikuti perubahan Undang-Undang di bawahnya. Saya menyarankan agar ditambahkan perluasan kewenangan Komisi Yudisial antara lain:
  - a. Kewenangan mengadakan penyadapan seperti halnya kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
  - b. Kewenangan memanggil dan memeriksa Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar kode etik serta menjatuhkan sanksi ringan sampai dengan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
  - c. Membentuk panitia seleksi Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah Konstitusi;
  - d. Membuat kode etik Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi panduan bertingkah laku dalam menjalankan tugas.
  - d. Semua yang diputuskan oleh Komisi Yudisial tidak perlu meminta persetujuan Ketua Mahkamah Konstitusi.
3. Kewenangan Dewan Etik sebagai pengawas internal tetap di pertahankan, namun kewenangan mengawasi hakim konstitusi dialihkan mengawasi pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Acton, Lord, *Letter to Bishop Mandel* (Creighton, 1887), dalam iriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Acton, Lord, *Letter to Bishop Mandell* (Creighton,1887), dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014
- Adhiwisastra, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, dalam Slamet Suhartono, Materi Kuliah Ilmu Hukum Dan Pendekatan Sistem, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca sarjana, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2012
- Ali, Achmad, ”*Keterpurukan Hukum Di Indonesia* “ Penerbit Ghalia Indonesia, Jl.Pramuka Raya No.4 Jakarta 13140, Cetakan pertama , Januari 2002
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta, 2010
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2014
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Bernegara*, Setara Press, Malang, 2015
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, KonPress, Jakarta, Jilid I, 2003
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Setjen Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Asshiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Jakarta, Kompas, 2005, hlm.153-154, dalam Sirajuddin, Disertasi, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Malang, 2009
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2018
- Azizah, Noor, *Urgensi Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Al Ulum, Vol.51 No.1 Januari 2012
- Bertens, K, *ETIKA*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kesebelas, Jakarta, 2011.
- Bertens, K, *Etika*, Edisi Revisi, Penerbit PT Kanisius, Yogyakarta, 2013
- Bertens, K, *ETIKA*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, Kompas Gramedia, Building Blok 1 Lantai 5 Jl. Palmerah Barat 29-3, Jakarta 10270
- Bertens, K. 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, dalam Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Bertens, K., *Etika*, Seri Filsafat Atma Jaya:15 Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2014
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam mengani suatu perkara pidana* (Aksara Persada, Jakarta, Indonesia, 1987

- Dimiyati, Khudzaifah, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan* (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008 Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010)
- Djohansjah, J., *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Kesain Blanc, 2008
- Duchacek, Ivo D., “*Constitutionalism*” dalam Bogdanor, Vernon (ed), *Blackwell’s Encyclopedia of Political Science*, Oxford: Blackwell, 1987
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, hlm.190 dalam Sirajuddin, Disertasi
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila* Aditama, Cetakan ke satu, Bandung, 2015
- Harjono, *Putusan Sela Bibit Chandra*, Majalah Konstitusi (Berita MK), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, No.33, Oktober, 2009, Jakarta
- Hufron, Materi Kuliah “*Kemandirian Judicial & kebebasan Asasi*”, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014
- Ihalauw, John J.O.I, *Konstruksi Teori Komponen Konsep*, Gramedia Widiasarana Indonesia Jakarta, 2008
- Ilmar, Aminuddin, *Konstruksi Teori, dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanudin University Press, Makasar, 2009
- Istanto, Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV.Ganda, Jakarta, 2007
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2014
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke 1, 2012

- Kamil, Ahmad, *Kata Sambutan*, dalam Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Edisi ke Dua, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General/ Theory of Law and State* (New York: Russel and Russel, 1971), Penerjemah: Raisul Muttaqien, Penyunting: Nurainun Mangunsong, Penerbit Nusa Media, 2014
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan nomor. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Jakarta, 2009, hlm.3 dalam Syarif Mappiasse, *Logika Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015
- Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan*, disusun oleh Kelompok Kerja A.2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Januari 2003, hlm.iii dalam Khudzaifah Dimiyati dkk, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan* (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri 2008 Komisi Yudisial, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010
- Kusnardi Moh dan Bintan R. Saragih, *Susunan pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta, 1989
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1995
- Loewenstein, Karl L, *Political Power and the Governmental Process*, 2nd ed. Chicago and London, 1965, hlm.8 dalam La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung, CV Utomo
- Lotullung, Paulus Effendi, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol (segi hokum Terhadap Pemerintah)*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Lubis, M.Solly, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2014
- Magnis, Franz -Suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

Ekatjahyana, Widodo, Sambutan Ketua umum Asosiasi Pengajar Hukum acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*

Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hal 52-56. Dalam Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, 2013, Bandung

Martosoewignjo, Sri Soemantri, 2005, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2016

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006

McIlwain, Charles Howard, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1966

MD, Mahfud dan kawan-kawan, *Constitutional Question (Alternatif baru Pencari Keadilan Konstitusional)*, UB Press, Malang, Januari 2010

MD, Mahfud, *Kata Pengantar Ketua Mahkamah Konstitusi RI*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009

MD, Moh.Mahfud. Et all, *Constitutional Question (Alternatif baru Pencarian Keadilan Konstitusional)*, UB-Press, Malang, 2010

MPR RI, *Panduan dasar Memasyarakatkan UUD tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2003

- Muhtaj, El, Majda, 2005. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004
- Nugroho, Irawan Amin, *Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Sebelas Maret, Solo, 2009
- Perry, Michael J., What is “the Constitution”? (and Other Fundamental Questions) dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm.90 dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Edisi revisi. Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta , 2016
- Prasetyo, Teguh, ”*Kriminalisasi dalam hukum pidana*”, Penerbit Nusamedia, cetakan ke tiga, Maret 2013, Bandung
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Penerbit Media Perkasa, Yogyakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 1977, h.10 dalam Hufron dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer (Telaah Teoritis Asal Mula*,
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982
- Raz, Joseph, On the Authority and Interpretation of Constitution Some Preliminaries, dalam Larry Alexander (ed), *Constitutionalism Philosophical Foundations*, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, hlm.153, dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti
- Reksodiputro, Mardjono, *Komisi Yudisial Wewenang dalam rangka Menegakkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Seta Menjaga*



- Perilaku Hakim di Indonesia*” dalam bunga rampai Setahun Komisi Yudisial RI, cetakan ketiga, 2010
- Sadjijono, *Hukum (Antara Solen dan Sein) dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia*, UBHARA Press & Laksbang PRESSindo, Surabaya, 2017
- Saleh, Imam Anshori, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014
- Saleh, Imam Anshori, *Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim*, Disertasi, Universitas Padjadjaran Bandung, 2013
- Santoso H.M. Agus, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Santoso, H.M. Agus, *Hukum, Moral, & Keadilan*, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2012
- Saunders, Cheryl, *The Constitutional Credential of Stat Constitutions*, *Rutgers Law Journal*, Vol 42, 2011, hlm. 853, dalam Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti
- Schwartz, Herman, *The Struggle For Constitutional Justice ind post-Communist Europe*, 2002, hlm.13, dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Bandung, 2006
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta , 2015
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2015
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang, Setara Press (Kelompok Intras Publisihing) dalam Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018

- Siyanto, Ach. Edi, *Yurisprudensi (Hukum Acara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press, Jakarta, 2014
- Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*
- Soenyono, *Sosiologi Hukum*, Lembaga Studi Otonomi Daerah dan Politik Lokal (L-SOD), Jawa Barat, 2009
- Solly, Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Sumaryono, E, 1995, *Etika Dasar*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, CV Andi Offset (Penerbit Andi), Yogyakarta, 2016
- Syam, Mohammad Noor, *Filsafat Ilmu*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, 2006
- Syam, Mohammad Noor, *Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia Wawasan Sosio-Kultural, filosofis dan konstitusional*, edisi II, (Malang Lboratorium Pancasila, 2000
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008
- Taverne, dalam Khudzaifah Dimiyati, *Potret Profesionalisme Hakim Dalam Putusan (Laporan Penelitian Putusan Pengadilan Negeri)*, 2008, Komisi Yudisial RI
- Widiada, *Kebijakan Leglisasi Tentang Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Disertasi, Universitas Katolik Parahyangan, 2008, hlm.145 dalam Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Penerbit Aditama, Bandung, 2015
- Wigiosoebroto, Soetandyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 1974
- Wiyon,o Suko, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2012

Wiyono, Suko, *Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi

Wiyono, Suko, *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Penerbit Universitas Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2012

Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I (Jakarta, Yayasan Prapanca, 1959), hlm.341-342, dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa,

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/ 1978. Sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 ditegaskan bahwa Pancasila menjadi sumber tertib hukum Republik Indonesia

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 untuk diputuskan pada sidang tahunan MPR RI tahun 2002.

Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor. IV/MPR/1983 tentang Referendum.

Ketetapan MPR RI Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI

Ketetapan MPR diantaranya Ketetapan Nomor IX/MPR/2000 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945 tahap ke *tiga*.

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Perubahan atas Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1973.

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK.

Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP menjadi bersifat tetap.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2013 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 48/2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan  
Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) anggota hakim konstitusi.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dibentuklah lembaga independen yang diberi nama Komisi Ombudsman Nasional.

Peraturan Presiden Nomor. 18 Tahun 2011 menegaskan kedudukan, kewenangan, serta keanggotaan Komisi Kejaksaan.

Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 Komisi Kepolisian Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.  
Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2009

Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut yang terkait dengan pencabutan kewenangan Komisi Yudisial mengawasi hakim konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor, 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial *juncto* Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.09/PMK/2006 Tentang Kode Etik hakim konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.2 tahun 2013 Tentang Dewan Etik hakim konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 Komisi Kepolisian Nasional.

### **Disertasi, Jurnal, Makalah**

Anshori Saleh, Imam, Disertasi, *Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2013

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi sebagai Landasan Indonesia baru Yang Demokratis, (Pokok-Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Makalah* Disampaikan Dalam Seminar Hukum Nasional VIII. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999

Azizah, Noor, *Urgensi Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Al Ulum, Vol.51 No.1 Januari 2012

Hufron, *Disertasi Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm.48-49. Dalam Yosran,

- MKPD-2, *Perlindungan Hukum Pejabat Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, 2016
- Harjono, *Putusan Sela Bibit Chandra*, Majalah Konstitusi (Berita MK), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, No.33, Oktober, 2009, Jakarta
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (PT. Alumni, Bandung, 2002), hlm.12 dalam Jurnal Konstitusi, PKK-FH Universitas Wisnuwardhana volume 1 nomor 2 November 2009, Diterbitkan oleh: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Manan, Bagir dalam Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2010, dalam jurnal konstitusi, volume13, nomor 4, Desember 2016
- Manan, Bagir, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Makalah, 1994), hlm.2 dalam Suko Wiyono, *Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, Volume III Nomor 1, Juni 2010), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Manan, Bagir, *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Makalah, 1994), hlm.2 dalam Suko Wiyono, *Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*,
- Mulyosudarmo, Suwoto, *Hak Menguji Hukum Positif oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jurnal Yustika Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya, 1998), hlm. 6 dalam Suko Wiyono, *Judicial Review dan Pengaturannya Dalam sistem Hukum Nasional*, (Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, Volume III Nomor 2, Juni 2010), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Mahfud, MD, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945*, makalah pada Diskusi publik tentang *Wacana Amandemen Konstitusi* yang diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) di Jakarta, tanggal. 12 Juni 2008.

- Marzuki, Suparman, *Komisi Yudisial antara Pengawasan dan Independensi Hakim*, Diskusi tentang Refleksi 6 tahun KY dan Proyeksi Menyongsong Revisi UU KY, (Buletin Komisi Yudisial, volume VI No.1 Agustus-September 2011), Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Majalah Konstitusi Nomor 132, *Bawaslu*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Februari, Jakarta, 2018
- Saunders, Cheryl, *The Constitutional Credential of Stat Constitutions*, *Rutgers Law Journal*, Vol 42, 2011
- Silviany, Disertasi, *Kemandirian Hakim Dalam Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung Dan Berwibawa*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016
- Sirajuddin, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Disertasi untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doctor Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tata Negara, Universitas Brawijaya, Malang, 2009
- Soedi, Disertasi, *Urgensi Berita Acara Sidang Berbasis Teknologi Informasi Untuk Mewujudkan Visi Peradilan Yang Agung*, Program Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018
- Suradiyanto, Ringkasan Disertasi “*Pembangunan Hukum Investasi Dalam Peningkatan Penanaman modal Di Indonesia* (2015)
- Syam, H.M. Noor, *NKRI sebagai sistem Kenegaraan Pancasila dalam Wawasan Filosofis-Ideologis dan Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, PKK Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, volume 1 nomor 2, 2009
- Suparman, Eman, *KY Menjaga Independensi Hakim*, Kuliah Umum di Universitas Eka Sakti Padang, (Buletin KY, Vol.V No. 6 Juni-Juli, 2011), Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta
- Wiyono, Suko, *Peraturan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-undangan Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi.



## **Website**

[https://media.neliti.com>publications](https://media.neliti.com/publications), jurnal konstitusi, volume 13, nomor 4, desember, 2016

<https://komisi-kejaksaan.go.id/urgensi-penguatan-komisi-kejaksaan>, akses tanggal. 22- Januari 2019

[www.komisi.yudisial.go.id](http://www.komisi.yudisial.go.id) akses tanggal. 22 Oktober 2018

[Ombudsman.go.id/profiles/index/pfft](http://Ombudsman.go.id/profiles/index/pfft), akses tanggal 22 Januari 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/20/17553741/mk-dinilai-lembaga-yang-lemah-pengawasan>. Akses tanggal 15 Nopember 2018

[https://media.neliti.com>publications](https://media.neliti.com/publications), jurnal konstitusi, volume 13, nomor 4, desember, 2016